

Penerapan Model Pengembangan Masyarakat Lokal Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Rengganis dalam Program Perhutanan Sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Model of Implementing Local Community Development Through the Rengganis Tourism Social Forestry Business Group (KUPS) in the Social Forestry Program in Pakis Village, Panti District, Jember Regency

Whimas Jessica Ayudia Puteri¹, Diah Puspaningrum¹

¹ Universitas Jember

Email: puspa.faperta@unej.ac.id



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Copyright (c) 2024 Jurnal Agribest



Corresponding Author: Diah Puspaningrum, Universitas Jember, puspa.faperta@unej.ac.id

ABSTRAK

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Rengganis menjadi bagian kontribusi LMDH Rengganis dalam memajukan taraf ekonomi dan mengoptimalkan potensi hutan di wilayah Desa Pakis. Permasalahan yang sering terjadi pada KUPS Wisata Rengganis yaitu lemahnya pelaksanaan administrasi dan pengelolaan wisata dikarenakan secara umum, pengelola KUPS Wisata Rengganis belum sepenuhnya memahami dan memiliki wawasan prospek wisata sebagai produk jasa yang menguntungkan. Model pengembangan masyarakat lokal pada KUPS Wisata Rengganis menjadi pihak utama dan aktif dalam mengambil keputusan atas apa yang terbaik dengan bermusyawarah, mengusulkan, dan memberikan keputusan. Tujuan penelitian untuk menganalisis model pengembangan masyarakat lokal melalui KUPS Wisata Rengganis dalam Program Perhutanan Sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan menggunakan purposive method. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan dua belas indikator model pengembangan masyarakat lokal yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan yang dibentuk. Melalui 12 indikator model pengembangan masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu indikator yang cukup untuk dipertahankan dan indikator yang perlu peningkatan pengembangan wisata agar dapat berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : KUPS Wisata Rengganis, Model Pengembangan Masyarakat Lokal

ABSTRACT

Rengganis tourism social forestry business group (KUPS) is part of Lmdh Rengganis ' contribution in advancing the economic level and optimizing Forest potential in the Pakis Village area. The problem that often occurs in KUPS Rengganis tourism is the weak implementation of Tourism Administration and management because in general, managers of KUPS Rengganis Tourism do not fully understand and have insight into the prospects of tourism as a profitable service product. The local community development Model at KuPS Wisata Rengganis becomes the main and active party in making decisions on what is best by deliberating, proposing, and making decisions. The purpose of the study was to analyze the model of local community development through Rengganis tourism KUPS in the Social Forestry Program in Pakis Village, Panti District, Jember Regency. Site selection was conducted using purposive method. This study uses qualitative research methods. Data collection methods used are observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study used twelve indicators of local community development model that can improve the economy and welfare of the community in accordance with the objectives established. Through the 12 indicators of local community development models can be categorized into two parts, namely indicators that are sufficient to be maintained and indicators that need to increase tourism development in order to be sustainable and prosper the community.

Keywords: Rengganis Tourism KUPS, Local Community Development Model

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan di tingkat dasar (tapak) dilakukan oleh KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) salah satunya melalui Program Perhutanan Sosial (social forestry). Pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial menitikberatkan pada strategi pemberdayaan partisipatif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya hutannya secara sukarela dan lestari. Menurut Yuliana (2022:2801) menyatakan, pengelolaan hutan secara sosial ditujukan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan hutan dan membudidayakan kawasan hutan serta menggantungkan hidupnya terhadap hasil hutan, sehingga kegiatannya dapat mempengaruhi ekosistem hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK tahun 2016 telah dijelaskan bahwa tujuan dari program perhutanan sosial yaitu pertama, pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, dan kemitraan. Kedua, untuk menyelesaikan permasalahan tenurial hutan serta keadilan bagi masyarakat setempat dan adat di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah potensial dalam pengembangan wilayah hutan dengan luasan 797.023,31 ha yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota. Berdasarkan data statistik Jawa Timur Tahun 2021 diketahui bahwa Kabupaten Jember memiliki wilayah kawasan hutan produksi seluas 22.20,48 ha dan kawasan hutan lindung seluas 39.614,13 ha (BPS Jatim, 2021). Sebagai wilayah yang cukup potensial dalam penyediaan hutan produksi dan hutan lindung, Kabupaten Jember juga memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan kawasan hutan di berbagai wilayah tingkat kecamatan. Luas kawasan hutan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Kecamatan Panti merupakan urutan kedua dari total luas areal hutan sebesar 10.630,50 ha. Luas hutan tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu hutan produksi sebesar 7.074,85 ha dan luas hutan lindung sebesar 1.352,22 ha (BPS, 2023). Adanya luas wilayah hutan tersebut perlu adanya sebuah pengelolaan hutan yang tepat melalui partisipasi aktif agar sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara tepat. Menurut Ardyanny dkk (2020:342) bahwa, pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah. Pengelolaan hutan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus tetap mengedepankan peran masyarakat sebagai komunitas sosial melalui konsep pemberdayaan secara partisipatif.

Pemberdayaan masyarakat di kawasan sekitar hutan juga harus memperhatikan semua prinsip pengelolaan program kehutanan sosial secara komprehensif. Program perhutanan sosial merupakan program yang dirancang pemerintah untuk membangun keseimbangan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan, guna membawa keberdayaan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Merujuk pada program perhutanan sosial guna memberdayakan masyarakat, maka dibentuklah salah satu lembaga yaitu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dibentuk oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat. KUPS merupakan kelompok yang menjadi legalitas jenis-jenis usaha dalam pengelolaan kawasan di sekitar hutan (Satriadi dkk, 2020:204).

Desa Pakis Kecamatan Panti sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki potensi pengelolaan usaha kehutanan berbasis partisipasi masyarakat atau yang disebut dengan KUPS. Pembentukan KUPS menjadi bagian kontribusi LMDH Rengganis dalam memajukan taraf ekonomi dan mengoptimalkan potensi hutan di wilayah Desa Pakis (Aji & Soejono, 2021:8). Lembaga KUPS di Desa Pakis saat ini memiliki 4 kelompok usaha yang resmi dari kementerian meliputi KUPS Kopi Rengganis, KUPS Durian Rengganis, KUPS Wisata Rengganis dan KUPS Ternak Rengganis. Keberadaan berbagai kelompok usaha tersebut dapat menjadi kegiatan yang meningkatkan pelestarian hutan dan usaha meningkatkan kesejahteraan, derajat dan martabat masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan (Insusanty dkk, 2023:1).

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti bahwa saat ini KUPS yang paling beroperasi dan berdampak bagi masyarakat Desa Pakis dan sekitarnya adalah KUPS Wisata Rengganis. KUPS Wisata Rengganis memiliki predikat gold yang bergerak dalam pengoptimalan potensi wisata alam yaitu meliputi wisata air terjun yang berada di wilayah Perhutani melalui kerjasama dengan LMDH Rengganis, kampung durian, wisata kopi dan mandi air sungai. Sebagai sarana pemberdayaan masyarakat wilayah hutan, usaha pengelolaan wisata alam oleh KUPS bersama masyarakat tentu tidak terlepas dari adanya permasalahan yang ada. Permasalahan yang sering terjadi pada KUPS Wisata Rengganis yaitu lemahnya pada pelaksanaan administrasi dan pengelolaan wisata. Masalah lain yang terjadi yaitu belum optimalnya pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan eksternal yang dapat menyebabkan pengembangan KUPS Wisata Rengganis menjadi terhambat. Adanya perencanaan pengembangan pengelolaan wisata yang baik perlu dilakukan melalui intervensi model pemberdayaan yang lebih sistematis dan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberdayaan masyarakat.

Menurut Faoziyah 2020:3, hakikatnya intervensi komunitas merupakan salah satu metode yang dilakukan pada level komunitas sebagai sebuah metode yang dapat mencapai tujuan peningkatan masyarakat. Bagian dari model intervensi komunitas yakni pengembangan masyarakat lokal. Model pengembangan masyarakat lokal pada KUPS Wisata Rengganis bahwa menjadi pihak utama dan aktif dalam mengambil keputusan atas apa yang terbaik dengan bermusyawarah, mengusulkan, dan memberikan keputusan. Strategi perubahannya yang digunakan menekankan pada usaha melibatkan partisipasi kelompok secara menyeluruh

baik dari sisi sumber daya alam, manusia, fisik, dan lingkungan eksternal. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini untuk melihat pendekatan pemberdayaan pada KUPS ini melalui model pengembangan masyarakat lokal. Bahwa, usaha intervensi pengembangan masyarakat lokal tersebut menitikberatkan pada partisipasi dalam mengaktualisasikan aset-aset lokalnya, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sebagainya untuk kepentingan kemakmuran masyarakat itu sendiri (Hidayat, 2020:131).

METODE PENELITIAN

Metode penentuan lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan *purposive method* (sengaja). Lokasi yang dipilih adalah di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian yaitu Desa Pakis memiliki potensi agroklimat dan topografi yang sesuai dengan kawasan hutan. LMDH Desa Pakis yang berhasil melaksanakan Program Perhutanan Sosial melalui 4 KUPS yang langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya KUPS Wisata Rengganis, KUPS Kopi Rengganis, KUPS Durian Rengganis dan KUPS Ternak Rengganis. KUPS yang berhasil dan berdampak positif hingga saat ini serta dikelola oleh anggota masyarakat Desa Pakis yaitu KUPS Wisata Rengganis dengan predikat gold dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan model pengembangan masyarakat lokal melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Rengganis dalam program perhutanan sosial di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Metode penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive method*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, terdapat 2 jenis informan dalam penelitian ini antara lain key informan dan informan pendukung. Key informan dalam penelitian yaitu Ketua KUPS Wisata Rengganis. Informan pendukung terbagi menjadi dua yaitu informan utama dan informan tambahan. Informan utama dalam penelitian yaitu Ketua LMDH Rengganis, Sekretaris KUPS Wisata Rengganis, Bendahara KUPS Wisata Rengganis, Anggota KUPS Wisata Rengganis, Penjaga warung Wisata Rengganis, Pedagang Wisata Rengganis, Pengunjung Wisata Rengganis. Informan tambahan pada penelitian yaitu Penyuluh Kehutanan Desa Pakis, Pemerintah Desa Pakis, Kelompok Remaja Masjid Al-Mubarak dan Kelompok keamanan.

Metode pengumpulan data merupakan metode untuk mengumpulkan data secara sistematis sebagai informasi dan masalah dari penelitian yang dilakukan. Sumber dari pengumpulan data ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian dan data sekunder merupakan data resmi yang diperoleh secara tidak langsung melalui informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada tiga yaitu observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis data Miles dan Huberman (2014) bahwa, tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*data collection*) merupakan proses mengumpulkan semua informasi yang telah diperoleh dari informan berupa data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari kegiatan tersebut mendapatkan data yang bervariasi dan dikumpulkan menjadi satu serta melakukan pencatatan yang dikembangkan menjadi pengkodean sehingga akan muncul pola dan menulis kembali yaitu reduksi data. Reduksi data akan menghasilkan ringkasan data yang lebih terperinci ke dalam pembahasan terkait model pengembangan masyarakat lokal melalui KUPS Wisata Rengganis di Desa Pakis.
2. Reduksi data (*data reduction*) atau kondensasi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan dan memfokuskan sebuah data. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk memahaminya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus dalam proses pengumpulan data hingga tahap kesimpulan dan verifikasi data. Proses tahapan reduksi data dapat dilakukan dengan singkat namun harus berkali kali tergantung dengan tingkat permasalahan yang akan diteliti. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian adalah terkait data model pengembangan masyarakat lokal melalui KUPS Wisata Rengganis di Desa Pakis.
3. Penyajian data (*data display*) dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan lain sebagainya. Penyajian data pada penelitian ini terkait model pengembangan masyarakat lokal melalui KUPS Wisata Rengganis di Desa Pakis disajikan menggunakan bentuk teks naratif dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan (*chart*) terkait dengan hasil observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam dan dokumentasi kepada informan didukung dengan teori dan data sekunder lainnya.

4. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*) bahwa penelitian kualitatif ini mengedepankan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas keberadaannya. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi data dengan menemukan hubungan antar pola lalu menarik pola jawaban, kebenaran jawaban dan menarik kesimpulan. Kesimpulan disusun dalam bentuk narasi yang dapat dideskripsikan dengan gambaran yang jelas terkait dengan model pengembangan masyarakat lokal melalui KUPS Wisata Rengganis di Desa Pakis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rothman (1987) dalam Adi (2008:121) menyebutkan bahwa, model pengembangan masyarakat lokal dapat dibedakan menjadi 12 indikator dalam pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Rengganis dalam Program Perhutanan Sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Berikut merupakan penjelasan mengenai 12 indikator yaitu :

1. Indikator kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat

Tujuan masyarakat bersifat *process goals* (Rothman dan Tropman, 1987 dalam Adi, 2008:125). Tujuan tersebut berupaya untuk mengembangkan masyarakat dalam memecahkan masalah secara kooperatif berdasarkan kemauan dan kemampuan dalam menolong diri mereka masing-masing. Tujuan dibentuknya KUPS Wisata Rengganis adalah untuk mengembangkan potensi wilayah hutan serta mengangkat perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Desa Pakis.

- a. Mengembangkan Potensi Wilayah Hutan

Kawasan wilayah hutan di Desa Pakis memiliki potensi yang menarik yaitu keindahan alamnya untuk membangun sebuah wisata. Wisata yang dibangun merupakan badan usaha dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rengganis di Desa Pakis yaitu KUPS Wisata Rengganis. Pada wisata tersebut merupakan kawasan yang terdiri dari pohon-pohon yang rindang, sungai serta tanaman kopi dan durian yang sangat indah untuk dinikmati. Keindahan alam yang ada di wisata merupakan potensi dari KUPS Wisata Rengganis yang dapat memikat para pengunjung ketika berada di wisata.

- b. Mengangkat Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pakis

Tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya alam buatan dan mengelola sumber daya manusia agar mereka dapat hidup mandiri serta sejahtera (Zahran & Hermansah, 2022:24). Hal ini membuktikan bahwa dampak positif dengan adanya potensi wilayah hutan yang telah ada juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Tujuan tindakan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan di KUPS Wisata Rengganis memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi wilayah hutan serta menambah perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Pakis.

2. Asumsi Mengenai Struktur Komunitas dan Kondisi Permasalahannya

Indikator asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan relasi dalam memecahkan sebuah masalah (Amarudin & Maarif, 2022:122). Struktur komunitas yang ada di KUPS Wisata Rengganis merupakan bagian dari struktur organisasi yang telah dibentuk yaitu terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang mengikuti saham sebanyak 25 orang. Relasi yang dibentuk di dalam struktur tersebut yaitu saling bekerja sama dan bertanggung jawab sesuai tugas yang telah diberikan. Kondisi permasalahan yang terjadi yaitu kurang aktifnya peran dari bagian pelaksana. Berikut merupakan penjelasan dari indikator yang kedua yaitu :

- a. Struktur Organisasi dan Relasi di KUPS Wisata Rengganis

Struktur organisasi merupakan alur dari pembagian kerja dan terjalin komunikasi antar individu yang ada di dalam struktur tersebut (Syipa dkk., 2023:62). Struktur organisasi meliputi adanya peranan dan tugas sebagai tanggung jawab dari masing-masing individu dalam organisasi. Struktur organisasi di KUPS Wisata Rengganis yang telah dibentuk yaitu terdiri dari penasehat yang mengawasi serta membimbing KUPS Wisata Rengganis, ketua sebagai pengkoordinir berlangsungnya kegiatan di wisata, sekretaris untuk mencatat kebutuhan kegiatan wisata, bendahara untuk mengelola keuangan wisata dan anggota sebagai bagian yang terpenting untuk melaksanakan kegiatan di wisata.

Menurut Asyraini (2021:355), aktivitas dalam suatu organisasi memerlukan sebuah koordinasi yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan timbul keharmonisan dalam pelaksanaan aktivitas tersebut. Koordinasi yang baik juga akan menambah hubungan atau relasi sosial yang baik dan saling bekerja sama. Relasi sosial atau hubungan sosial merupakan tindakan dari kegiatan dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki tujuan (Enifika dkk., 2020:1). Hubungan tersebut dapat terjadi di dalam kelompok organisasi dalam waktu yang relatif lama. Relasi sosial dapat dimulai ketika proses interaksi sosial berlangsung, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Menurut Lillah & Puspaningrum (2020:105), relasi sosial terbagi menjadi tiga bagian : (1) domain interpersonal mengkaji relasi antara dua individu. (2) domain

dinamika kelompok mengkaji mengenai relasi antara individu di dalam suatu kelompok tertentu. (3) domain antar kelompok yang berfokus pada relasi antara dua atau lebih kelompok.

Bentuk relasi yang ada di KUPS Wisata Rengganis terdapat pada domain yang pertama yaitu domain interpersonal dimana, struktur organisasi terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Domain interpersonal dibagi menjadi 3 bagian yaitu relasi komunal yang menekankan kesatuan tanpa terdiferensiasi, kedua relasi kolegal menekankan kesetaraan yang memberikan rasa keadilan dan ketiga relasi hierarkis menekankan otoritas dan kuasa individu terhadap individu lain. Relasi komunal yang terjalin yaitu anggota KUPS Wisata Rengganis dapat bekerja sama pada bagian parkir, tenda, ban atau *flying fox*. Para anggota tersebut melakukan secara bersama-sama dan saling membantu jika terdapat kendala dalam penjagaan yang dilakukannya.

Relasi kolegal yang terjadi di KUPS Wisata Rengganis adalah ketua KUPS Wisata Rengganis memberikan rasa kesetaraan atau keadilan terhadap anggota nya. Hal tersebut dapat dilihat dari keadilan dalam pembagian hasil wisata dan dilihat dari semangat mereka untuk bekerja di wisata serta ketua KUPS Wisata Rengganis juga dapat mengartikulasikan kebutuhan yang ada pada anggota nya. Relasi hierarkis pada struktur organisasi KUPS Wisata Rengganis adalah pemberian wewenang dan arahan langsung dari LMDH Rengganis sebagai badan induk yang menaungi KUPS Wisata Rengganis. Pihak LMDH Rengganis memiliki kekuasaan terhadap KUPS Wisata Rengganis sebagai badan usaha yang dimilikinya. LMDH Rengganis dalam struktur organisasi sebagai penasehat yang memberikan arahan dan pengawasan terhadap KUPS Wisata Rengganis. Selain itu, relasi hierarkis juga terjadi dalam ketua KUPS Wisata Rengganis dengan anggota yang dapat dilihat melalui ketertiban anggota dalam menjalankan tugas dan peran nya serta ketua KUPS Wisata Rengganis memberikan arahan dan masukan untuk anggota tersebut.

Adanya relasi atau kerjasama yang baik dapat menjadikan hubungan antar anggota di KUPS Wisata Rengganis menjadi lebih harmonis. Hubungan yang ada di KUPS Wisata Rengganis terbagi menjadi dua yaitu asimetris dan simetris. Hubungan asimetris dapat dilihat dari ketua KUPS Wisata Rengganis yang dapat memberikan arahan dan wewenang untuk anggota nya. Hubungan tersebut berdasarkan karena anggota memiliki kebiasaan atau kedekatan emosional dengan ketua KUPS Wisata Rengganis, sehingga dapat dilihat dari kebiasaan yang harus tunduk atau mengikuti arahnya (Puspaningrum & Kusmiati, 2018:62). Hubungan simetris merupakan hubungan dua orang yang sederajat kedudukannya. Hal tersebut ditujukan untuk anggota KUPS Wisata Rengganis yang memiliki kedudukan sama dan saling bekerja sama satu sama lain.

b. Kondisi Permasalahan di Struktur Organisasi KUPS Wisata Rengganis

Relasi yang dibentuk yaitu saling bekerja sama tetap menimbulkan adanya permasalahan seperti bagian pelaksana parkir yaitu kekurangan tenaga kerja sebagai tukang parkir dan solusi yang diberikan yaitu mengajak anak-anak muda untuk gabung di wisata. Selain itu, permasalahan yang terjadi di struktur organisasi kurang optimal nya bendahara untuk menjalankan tugas nya sehingga peran ketua dan sekretaris dapat membantu.

3. Strategi Dasar dalam Melakukan Perubahan

Rothman dan Tropman (1987) dalam Adi (2008:128) menjelaskan bahwa strategi dasar dalam melakukan perubahan sangat menekankan keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah membahas masalah apa yang sedang terjadi. Strategi dasar yang dibentuk oleh KUPS Wisata Rengganis yaitu melibatkan kerja sama antar anggota serta pihak-pihak eksternal yang terkait. Berikut merupakan strategi dasar dalam melakukan perubahan di KUPS Wisata Rengganis :

a. Internal KUPS Wisata Rengganis

Pada KUPS Wisata Rengganis terdapat permasalahan seperti kurangnya tenaga kerja pada bagian parkir serta kurang optimalnya peran pengurus yang sudah diberikan tanggung jawab. Langkah untuk melakukan perubahan tersebut yaitu dengan kerja sama antar satu sama lain mengisi peran dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan, sehingga masalah yang terjadi dapat teratasi dengan baik. Langkah tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu.

b. Eksternal KUPS Wisata Rengganis

Pada eksternal ini lebih menjalin hubungan kerja sama yang baik antar pihak-pihak yang terkait wisata seperti pihak Cabang Dinas Kehutanan (CDK), Dinas Pariwisata, Perhutani, Pemerintah Desa Pakis, Pedagang dan Warung di wisata. Menunjukkan bahwa strategi dasar dalam internal dan eksternal KUPS Wisata Rengganis untuk melakukan perubahan yaitu sama seperti bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan mencari solusi permasalahan dengan bermusyawarah. Hal ini strategi dasar untuk KUPS Wisata Rengganis tetap memerlukan adanya diskusi dan kerja sama serta gotong royong yang tetap dijalankan. Pada prinsipnya kegiatan KUPS Wisata Rengganis mementingkan untuk mengangkat ekonomi serta sosial kepada warga masyarakat Desa Pakis.

4. Karakteristik Taktik dan Teknik Perubahan

Indikator karakteristik taktik dan teknik perubahan merupakan proses diskusi untuk pencapaian pengambilan keputusan bersama dan komunikasi antar anggota dan kelompok (Rothman dan Tropman, 1987 dalam Adi, 2008:129). Terdapat dua pengelompokan karakteristik taktik dan teknik perubahan di KUPS Wisata Rengganis yaitu internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Internal KUPS Wisata Rengganis

Permasalahan internal yang mempengaruhi pekerjaan lain dalam KUPS Wisata Rengganis yaitu kekurangan tenaga kerja seperti pada bagian parkir, sehingga mengajak anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi bekerja di wisata tersebut. Peran dari anak-anak muda sangat penting untuk pengembangan wisata dengan adanya arahan yang jelas, partisipasi dari anak-anak muda menjadi bagian yang dibutuhkan dan memiliki semangat yang tinggi. Lewat komunikasi secara lisan kepada anak-anak muda tersebut mampu untuk mengajak mereka dalam bekerja di wisata, selain itu juga ada dorongan serta manfaat yang akan diperoleh anak-anak muda tersebut.

b. Eksternal KUPS Wisata Rengganis

Taktik dan teknik perubahan yang digunakan di KUPS Wisata Rengganis pada sisi eksternal yaitu musyawarah dengan mengadakan perkumpulan dan berdiskusi hingga mufakat guna mengatasi permasalahan kurang tertibnya pengunjung serta hambatan komunikasi dengan Pemerintah Desa Pakis. Solusi yang diambil yaitu bermusyawarah terlebih dahulu ketika hendak memutuskan sebuah solusi. Adanya langkah mengadakan perkumpulan dan bermusyawarah menjadi hal yang terpenting di dalam mengambil tindakan. Langkah taktik dan teknik perubahan yang digunakan oleh pihak KUPS Wisata Rengganis mengutamakan prioritas sebagai konsensus yaitu diskusi kelompok dan partisipasi dalam memecahkan masalah (Gai, 2020:134).

5. Peran Praktisi Yang Menonjol

Menurut Indrawati & Paramastuti (2020:134) peran praktisi yang menonjol dapat sebagai koordinator, fasilitator dan pemungkin. Peran praktisi tersebut yang dapat memecahkan masalah dan mendukung masyarakat agar berproses untuk memiliki kapasitas dalam merealisasikan kebutuhan dan memecahkan masalah. Terdapat tiga peran praktisi yang menonjol di KUPS Wisata Rengganis yaitu pemungkin, fasilitator dan koordinator yang dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Pemungkin

Menurut Andari (2020:105), praktisi sebagai *enabler* (pemungkin) adalah seseorang yang membantu masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan masyarakat. Pada KUPS Wisata Rengganis praktisi sebagai pemungkin yaitu Bapak Hidayatullah selaku ketua KUPS Wisata Rengganis, dimana beliau menjalankan tugas dan perannya yang sesuai untuk kebutuhan anggota serta masyarakat. Peran praktisi yaitu Bapak Hidayatullah sebagai ketua KUPS Wisata Rengganis yang berperan sebagai pemungkin dan pengkoordinir dalam wisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang berasal dari ketua kemudian disampaikan ke sekretarisnya serta pemberian izin dan terdapat aturan yang telah disepakati ada pada ketua KUPS Wisata Rengganis sehingga para anggota wisata menaati dan menjalankan kewajiban tersebut.

b. Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang menghubungkan individu dan kelompok yang membutuhkan pelayanan. Fasilitator di KUPS Wisata Rengganis yaitu pendamping atau penyuluh kehutanan. Pendampingan yang diberikan kepada KUPS Wisata Rengganis tidak berdampak pada peningkatan pendapatan dari kelompok tersebut namun tugas dari fasilitator yaitu menyempurnakan dan memberikan motivasi serta inovasi dan menghubungkan dari berbagai pihak guna memperbaiki keadaan di kelompok organisasi serta pengembangan wisata tersebut.

c. Koordinator

Koordinator merupakan orang yang mengorganisasikan masyarakat atau kelompok dalam memerlukan bantuan. Koordinator dalam KUPS Wisata Rengganis yaitu Bapak Hartono selaku ketua LMDH Rengganis dan Bapak Hidayatullah selaku ketua KUPS Wisata Rengganis. Peran yang ada pada Bapak Hartono sebagai pengkoordinir yaitu memberikan pengawasan serta perlindungan untuk KUPS Wisata Rengganis, sedangkan peran Bapak Hidayatullah sebagai pengkoordinir yaitu mengkoordinir anggota, pedagang dan warung di KUPS Wisata Rengganis. Hadirnya para praktisi dalam kegiatan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan intervensi terhadap masalah internal dan eksternal yang terjadi di KUPS Wisata Rengganis.

6. Media Perubahan

Rothman dan Tropman (1987) dalam Adi (2008:130) menyatakan bahwa, media perubahan yaitu melibatkan kelompok-kelompok kecil (*small task oriented groups*). Kelompok-kelompok kecil ini berperan sebagai media atau sarana untuk merumuskan masalah, menyamakan langkah, membangun motivasi dan pemecahan masalah bersama. Pada KUPS Wisata Rengganis media perubahan yang dilakukan yaitu melibatkan anggota sebagai pelaksana kerja, kelompok pedagang serta warung dan pengunjung yang ada di

wisata tersebut. Berikut merupakan pembagian kelompok-kelompok kecil yang ada di KUPS Wisata Rengganis :

a. Internal KUPS Wisata Rengganis

Kelompok kecil dalam internal KUPS Wisata Rengganis terdiri dari penjaga tenda, ban, parkir serta *flying fox*. penjaga tersebut merupakan kelompok pelaksana yang turut berpartisipasi dalam menjalankan usaha di wisata. Masalah yang sering terjadi yaitu menghadapi para pengunjung wisata di bagian parkir solusi yang diambil yaitu diberikan arahan, sedangkan masalah di bagian tenda dan ban yaitu para pengunjung yang tidak tertib dalam mengantri solusi yang dibuat yaitu memberikan nomor antrian, sehingga solusi-solusi kecil berasal dari kelompok pelaksana tersebut.

b. Eksternal KUPS Wisata Rengganis

Kelompok kecil yang tergabung dalam KUPS Wisata Rengganis dari sisi eksternal yaitu pedagang dan warung. Kelompok-kelompok kecil seperti pedagang dan warung yang ada di wisata wajib untuk membayar dana kebersihan serta tugas dari pedagang dan warung tersebut yaitu membersihkan lapak yang mereka tempati. Terdapat permasalahan yaitu kebersihan dari warung satu dengan warung yang lainnya yang menimbulkan perpecahan pada penjaga warung kemudian diberikan solusi untuk dikumpulkan dan bermusyawarah secara bersama hingga kata mufakat. Hasil dari musyawarah tersebut diberikan pengarahannya oleh Penyuluh Kehutanan dan terdapat berita acara sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh kelompok tersebut.

7. Orientasi Terhadap Struktur Kekuasaan

Indikator ketujuh bahwa struktur kekuasaan diposisikan sebagai *partner* atau kolaborator yang bersifat umum dan bekerja bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitas lokal tersebut (Rothman dan Tropman, 1987 dalam Adi, 2008:131). KUPS Wisata Rengganis memiliki *partner* yaitu anak-anak muda yang ikut bekerja membantu wisata serta menjadi kolaborator dengan pihak Pemerintah Desa Pakis untuk menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Berikut merupakan penjelasan dari *partner* atau kolaborator dengan KUPS Wisata Rengganis :

a. *Partner* KUPS Wisata Rengganis adalah Anak-Anak Muda

Pihak KUPS Wisata Rengganis memiliki *partner* yaitu anak-anak muda yang ikut membantu dan bekerja di wisata, hal ini guna untuk memecahkan masalah yaitu kurangnya tenaga kerja pada bagian parkir. Tugas dari anak-anak muda sendiri yaitu menjaga dan mengamankan bagian parkir wisata. Pihak KUPS Wisata Rengganis menjadikan *partner* dengan anak-anak muda yang ikut berpartisipasi serta bekerja sama dalam menjalankan wisata. Anak-anak muda disini merupakan bagian penting untuk melaksanakan tugas seperti menjaga parkir serta sumber daya manusia atau regenerasi dari anggota KUPS Wisata Rengganis perlu diadakan karena untuk pengembangan wisata kedepannya.

b. Kolaborator KUPS Wisata Rengganis adalah Pemerintah Desa Pakis

Kolaborator KUPS Wisata Rengganis adalah Pemerintah Desa Pakis yang selalu memberikan solusi yaitu bermusyawarah secara bersama serta memberikan pemahaman yang lebih kepada pihak-pihak yang mengalami permasalahan tersebut. Penyuluh Kehutanan sebagai pihak fasilitator memberikan pandangan terhadap anggota KUPS Wisata Rengganis untuk mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga, dapat tetap satu tujuan untuk mengembangkan wisata ke arah yang lebih baik.

8. Batasan Definisi Penerima Layanan (*Beneficiaries*)

Rothman dan Tropman (1987) dalam Adi (2008:130) batasan definisi penerima layanan ditentukan oleh kesatuan wilayah geografis dimana ditujukan untuk komunitas yang terikat dalam wilayah geografis tertentu. Batasan definisi penerima layanan yang ada di KUPS Wisata Rengganis ditujukan oleh masyarakat yang ada di wisata itu sendiri khususnya anggota yang mengikuti saham, pedagang dan warung serta anak-anak muda yang membantu bekerja di wisata. Menurut Huraerah (2021:254), penerima layanan berdasarkan letak geografis bahwa semua warga masyarakat mempunyai kepentingan yang sama. Adanya kepentingan yang sama mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Berikut merupakan pernyataan dari berbagai informan mengenai batasan definisi penerima layanan :

a. Anggota Pemegang Saham KUPS Wisata Rengganis

Anggota pemegang saham di KUPS Wisata Rengganis sebanyak 25 orang sebagai donatur atau penyumbang modal di wisata. Anggota tersebut juga masuk dalam struktur organisasi KUPS Wisata Rengganis. Peran dari anggota pemegang saham selain memberikan modal juga ikut membantu bekerja di wisata. Anggota pemegang saham wajib untuk hadir pada Hari Jumat dan Hari Minggu untuk melakukan kerja bakti membersihkan wisata. Aturan yang ditetapkan yaitu membayar sebesar Rp25.000 di Hari Jumat dan Rp50.000 Hari Minggu sebagai sanksi tidak hadirnya para anggota tersebut. Anggota pemegang saham juga ikut membantu bekerja seperti menjaga tenda, ban dan parkir.

b. Pedagang dan Warung di KUPS Wisata Rengganis

Pedagang dan warung yang ada di wisata merupakan penerima manfaat yang cukup diuntungkan karena dengan berdirinya wisata tersebut pendapatan dari mereka meningkat. Peran dari pedagang dan warung

dalam wisata yaitu menjaga nama baik wisata serta tertib dalam hal kebersihan dan membayar iuran sebagai dana kebersihan untuk pengembangan KUPS Wisata Rengganis.

c. Anak-Anak Muda

Peran dari anak-anak muda di KUPS Wisata Rengganis yaitu ikut membantu bekerja pada bagian parkir karena kekurangan tenaga kerja. Anak-anak muda tersebut berasal dari Dusun Pakis Utara atau sekitar dari KUPS Wisata Rengganis. Adanya anak-anak muda permasalahan mengenai kekurangan tenaga kerja menjadi teratasi dengan baik. Sumber daya manusia dari anak-anak muda menjadi aset yang berharga bagi KUPS Wisata Rengganis kedepannya sebagai regenerasi dalam pengembangan wisata. Anak-anak muda juga merasakan dampak yang baik seperti memiliki penghasilan tambahan dari wisata.

9. Asumsi Mengenai Kepentingan dari Kelompok-Kelompok di dalam Suatu Komunitas

Rothman dan Tropman (1987) dalam Adi (2008:130) menyatakan bahwa, kelompok-kelompok yang ada dalam komunitas diajak untuk bekerja sama memecahkan masalah bersama-sama atas dasar kemufakatan atau kepentingan umum. Upaya kelompok tersebut akan mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Hal ini perlu adanya tindakan kejujuran dari semua bagian komunitas dalam berkomunikasi serta dalam kondisi tersebut kepentingan dari masing-masing kelompok seolah-olah melebur menjadi satu kepentingan (Amarudin & Maarif, 2022:124). Berdasarkan hal tersebut kelompok-kelompok yang tergabung dan memiliki kepentingan yang sama dengan KUPS Wisata Rengganis yaitu Kelompok Remaja Masjid Al-Mubarak Dusun Pakis Utara, Kelompok keamanan formal seperti Babinsa dan Babinkamtibmas serta kelompok non formal milik KUPS Wisata Rengganis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kelompok Remaja Masjid Al-Mubarak

Kelompok Remaja Masjid Al-Mubarak menjadi salah satu bagian yang memiliki dampak positif dengan adanya wisata tersebut. Dampak positif tersebut diwujudkan pada salah satu kegiatan yaitu pembayaran rekening listrik masjid dan acara kifayah bagi masyarakat di Dusun Pakis Utara yang membutuhkan bantuan. Kepentingan dari Kelompok Remaja Masjid Al-Mubarak terhadap adanya KUPS Wisata Rengganis yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda supaya untuk bekerja di wisata. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya KUPS Wisata Rengganis yaitu mengangkat perekonomian dan mensejahterakan warga masyarakat. Kepentingan dari kelompok remaja masjid dengan KUPS Wisata Rengganis tentu saja tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.

b. Kelompok Keamanan

Kelompok keamanan formal dalam KUPS Wisata Rengganis yaitu Babinsa dan Babinkamtibmas di Desa Pakis, sedangkan kelompok keamanan non formal yaitu kelompok yang dapat membantu memecahkan permasalahan seperti mencuri atau menghilangkan fasilitas di wisata. Peran dari Babinsa dan Babinkamtibmas di Desa Pakis yaitu turut menjaga keamanan wisata, sedangkan peran dari kelompok keamanan non formal yaitu menjaga barang atau fasilitas di wisata. Kepentingan dari kelompok keamanan ialah sebagai kepentingan sosial yang merupakan tanggung jawab bagi tugas mereka. Kepentingan kelompok non formal yaitu sebagai kepentingan yang bersifat ekonomi dengan adanya wisata mereka dapat mencukupi kebutuhan yang mereka inginkan. Kelompok keamanan ini sejalan dengan pihak KUPS Wisata Rengganis sehingga saling bekerja sama tanpa menimbulkan masalah.

10. Konsepsi Mengenai Penerima Layanan (*Beneficiaries*)

Konsepsi mengenai penerima layanan adalah warga masyarakat sekitar. Konsepsi tersebut merupakan warga masyarakat yang memberikan masukan dan pendapatnya penting untuk diperhitungkan, mereka dilibatkan secara penuh dalam memecahkan masalah (Indrawati & Paramastuti, 2020:135). Konsepsi penerima layanan merupakan warga masyarakat disini dipandang sederajat dan memiliki kekuatan yang sama namun belum sepenuhnya dikembangkan (Rothman dan Tropman, 1987 dalam Adi, 2008:135). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di KUPS Wisata Rengganis seperti pihak pemerintah desa yang memiliki kekuatan sama namun potensi yang diberikan belum sepenuhnya ada. Konsepsi penerima layanan lain seperti pengunjung wisata dan kelompok remaja masjid menjadi bagian terpenting yaitu pendapat atau masukan mereka dapat dijadikan bahan untuk pengembangan wisata. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa poin mengenai konsepsi mengenai penerima layanan :

a. Pemerintah Desa Pakis

Pemerintah Desa Pakis merupakan pihak eksternal yang ada dalam KUPS Wisata Rengganis. Keberadaan dari pemerintah desa yaitu dapat memberikan dukungan terhadap adanya wisata, selain itu keuntungan yang di dapat yaitu dapat menambah pendapatan kas desa untuk memenuhi tujuan yaitu dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga masyarakat Desa Pakis.

b. Kelompok Remaja Masjid Al-Mubarak

Kelompok remaja Masjid Al-Mubarak menjadi kelompok yang berada diluar KUPS Wisata Rengganis dan dapat menerima dampak positif. Dampak positif tersebut berupa bantuan sosial seperti pembayaran rekening listrik masjid dan acara kifayah bagi masyarakat yang membutuhkan, hal tersebut dilakukan sebagai

bentuk sosial yang nyata serta rasa bersyukur oleh KUPS Wisata Rengganis kepada warga masyarakat sekitar di Dusun Pakis Utara.

c. Pengunjung Wisata

Pengunjung wisata menjadi bagian terpenting atau faktor yang mempengaruhi pendapatan wisata. Tingkat keramaian pengunjung yang ada di KUPS Wisata Rengganis pada Hari Jumat-Hari Minggu atau hari libur. Pengunjung wisata juga dibebaskan untuk membawa makanan dan minuman luar. Tiket masuk wisata pengunjung sudah tergabung dengan bagian parkir wisata sehingga tidak mengharuskan untuk membayar *double* atau dua kali.

11. Konsepsi Mengenai Peran Penerima Layanan (*Beneficiaries*)

Rothman dan Tropman (1987) dalam Adi (2008:135) konsepsi mengenai peran penerima layanan adalah peran-peran yang aktif, partisipatif, baik dalam hal merumuskan masalah dan berusaha belajar dalam mengembangkan diri mereka sendiri. Konsepsi mengenai peran penerima layanan yang ada di KUPS Wisata Rengganis yang berasal dari konsepsi penerima layanan di atas seperti pemerintah desa, kelompok remaja masjid dan pengunjung wisata. Peran dari kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan bantuan atau memecahkan masalah serta mengambil tindakan yang tepat bagi pengembangan KUPS Wisata Rengganis kedepannya. Berikut penjelasan konsepsi mengenai peran penerima layanan (*beneficiaries*):

a. Peran Pemerintah Desa Pakis

Peran Pemerintah Desa Pakis untuk KUPS Wisata Rengganis yaitu memberikan pengawasan dan perlindungan serta membangun semangat masyarakat yang ada di Desa Pakis untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi yang telah dimiliki. Peran dari pemerintah desa juga mampu memperkenalkan wisata alam yang ada di Desa Pakis.

b. Peran Kelompok Remaja Masjid Al-Mubarak

Peran dari kelompok remaja Masjid Al-Mubarak untuk KUPS Wisata Rengganis yaitu dapat membantu bekerja di wisata pada bagian parkir. Anak-anak muda yang tergabung dalam remaja masjid tersebut dapat memberikan kontribusi sumber daya manusia berupa tenaga kerja. Tenaga kerja sangat dibutuhkan bagi KUPS Wisata Rengganis untuk mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja tersebut. Anak-anak muda tersebut juga mempunyai rasa semangat yang tinggi untuk bekerja di wisata.

c. Peran Pengunjung Wisata

Pengunjung wisata merupakan faktor terpenting untuk beroperasinya sebuah wisata. Peran dari pengunjung sendiri selain memenuhi keinginan mereka untuk berlibur juga dapat memberikan motivasi, saran serta masukan untuk keberlanjutan KUPS Wisata Rengganis. Saran dan masukan yang diberikan sangat diterima oleh pihak KUPS Wisata Rengganis dan juga dapat berupa kepuasan mereka untuk berkunjung kembali di KUPS Wisata Rengganis.

12. Pemanfaatan Pemberdayaan

Rothman dan Tropman (1987) dalam Adi (2008:137) bahwa, pemanfaatan pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian masyarakat dalam menghadapi masalah yang dapat meningkatkan kapasitas sehingga timbul rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota masyarakat. Kapasitas merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan dan potensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi masalah mereka sendiri (Ikhwan dkk., 2023:4). Adanya kapasitas dalam diri individu, kelompok atau organisasi untuk menjalankan suatu fungsi sehingga dapat secara efisien, efektif dan terus menerus untuk dilakukan. Pemberdayaan melalui KUPS Wisata Rengganis dapat meningkatkan kapasitas ekonomi baik individu yaitu anggota pemegang saham, kelompok yaitu KUPS Wisata Rengganis serta masyarakat seperti pedagang, warung dan anak-anak muda. Berikut merupakan penjelasan mengenai pemanfaatan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas ekonomi individu, kelompok dan masyarakat di KUPS Wisata Rengganis :

a. Kapasitas Individu

Kapasitas individu pada anggota pemegang saham yaitu dapat meningkatkan ekonomi melalui KUPS Wisata Rengganis. Kapasitas ekonomi merupakan bentuk untuk meningkatkan atau memperkuat kemampuan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan perekonomian di suatu wilayah setempat.

b. Kapasitas Kelompok

Kapasitas kelompok yaitu KUPS Wisata Rengganis ditandai dengan meningkatnya perekonomian atau kas dari kelompok tersebut. Meningkatnya pendapatan atau kas untuk wisata dapat merumuskan atau merencanakan pengembangan yang akan dilakukan oleh wisata untuk kedepannya yang lebih baik. Pengembangan wisata tersebut dapat dilakukan ketika kelompok tersebut sudah berdaya atau memberikan kekuatan untuk anggota serta masyarakat lainnya. KUPS Wisata Rengganis belum mengadakan pelatihan bagi anggota serta masyarakat sekitar untuk meningkatkan kapasitas mereka masing-masing. Pengembangan dan perencanaan yang akan dilakukan oleh pihak wisata untuk kedepannya serta pelatihan yang dilakukan masih sebatas untuk pengurus sehingga, perlu adanya pelatihan khusus bagi anggota KUPS Wisata

Rengganis. Administrasi di KUPS Wisata Rengganis juga perlu dilaporkan untuk pertanggung jawaban selama kegiatan wisata berjalan. Minimnya pendampingan dalam aktivitas kepariwisataan di KUPS Wisata Rengganis dapat menyebabkan alur kerja yang kurang terarah disebabkan kualitas SDM pengelola wisata yang belum memadai sepenuhnya. SDM pengelola wisata merupakan kunci keberhasilan untuk memanfaatkan peluang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sidiq dkk., 2023:666).

c. Kapasitas Masyarakat Desa Pakis

Kapasitas masyarakat Desa Pakis khususnya pedagang, warung dan anak-anak muda menjadi bertambah pendapatannya. Pendapatan yang meningkat tersebut untuk mencukupi kebutuhan diri mereka masing-masing.

Dampak baik yang dirasakan masyarakat dengan adanya KUPS Wisata Rengganis yaitu berdampak pada peningkatan pendapatan dilihat dari sisi ekonomi. Masyarakat dapat bekerja sampingan seperti berdagang dan pihak wisata memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dampak lain yaitu dapat melestarikan wilayah alam yang berbasis kehutanan demi keberlanjutan pengembangan wisata yang lebih maju. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengelola sampah masyarakat serta kebersihan dari pemilik warung dan pedagang yang menjadikan perubahan perilaku tentang kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dua dampak tersebut dapat memberikan solusi terkait pengembangan wisata kedepannya mengenai pengelolaan wisata yang berbasis keberlanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, kesimpulan yang didapat adalah model pengembangan masyarakat lokal melalui KUPS Wisata Rengganis dilakukan dengan cukup baik namun, perlu untuk pengembangan pada wisata tersebut. KUPS Wisata Rengganis melalui proses pemberdayaannya dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Dari 12 indikator dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu indikator yang dapat dipertahankan atau baik yaitu kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat (indikator 1), strategi dasar dalam melakukan perubahan (indikator 3), peran praktisi yang menonjol (indikator 5), media perubahan (indikator 6), orientasi terhadap struktur kekuasaan (indikator 7), batasan definisi penerima layanan (*beneficiaries*) (indikator 8), asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok (indikator 9), konsepsi mengenai penerima layanan (*beneficiaries*) (indikator 10) dan konsepsi mengenai peran penerima layanan (*beneficiaries*) (indikator 11), sedangkan indikator yang perlu ditingkatkan atau kurang baik yaitu asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya (indikator 2), karakteristik taktik dan teknik perubahan (indikator 4), dan pemanfaatan pemberdayaan (indikator 12).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Aji, N. D. S., & Soejono, D. (2021). Peran Stakeholder Terhadap Program Agroforestri dan Pendapatan Rumah Tangga Petani LMDH Rengganis Desa Pakis Kecamatan Panti. *Jurnal Kirana*. 2(1) : 1-18.
- Amarudin, M., & Maarif, U. (2022). Membangun Desa Wisata Berbasis Komunitas di Pujon Kidul Malang. *INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*. 4(1) : 117-134.
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. 6(2) : 92-113.
- Ardyanny, F., Santoso, B., & Cahyaningtyas, I. (2020). Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Notarius*. 13(1) : 341-354.
- Asyraini, S. (2021). Peranan Struktur Organisasi dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja Pada PT. Astra Internasional Medan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*. 4(1) : 353-364.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Jember. (2023). *Kabupaten Jember dalam angka 2023*. Jember : Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (2021). *Provinsi Jawa Timur dalam angka 2021*. Jember : Badan Pusat Statistik.
- Enifika, D. R., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Relasi Sosial Asosiatif dalam Kelompok Tani Dewi Ratih Kecamatan Mempawah Hilir Kelurahan Terusan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*. 9(7) : 1-7.
- Faoziyah, S. (2020). Intervensi Pengembangan Masyarakat Melalui Model Pengelolaan Pesisir Karangsong Kabupaten Indramayu. In *Proceeding International Conference On Social Work (ICSW)*. 2(1) : 1-21.
- Gai, M. A. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Penyangga yang Tepat di TN Sebangau Berdasarkan Perspektif Sustainable Livelihood Approach. *Planoearth*. 5(2) : 129-134.
- Hidayat, A. F. A. (2020). Pengembangan Komunitas Lokal Sektor Ekonomi Pada Desa Nglanggeran Yogyakarta. *INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*. 2(1) : 127-152.
- Huraerah, A. (2021). Perbandingan Model Intervensi Komunitas dalam Praktik Makro Pekerjaan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. 7(3) : 250-263.
- Ikhwan, H. S., Mildawati, I., & Rismiyati, F. (2023). Pengembangan Kapasitas Objek Wisata Cetu Cibereum: Value Creation Di Desa Rawa Panjang Bojong Gede Cibinong Bogor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Darma Saskara*. 2(1) : 1-9.
- Indrawati, I., & Paramastuti, S. (2020). Intervensi Komunitas “Rifka Annisa” Yogyakarta pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*. 1(2) : 127:152.
- Insusanty, E., Ningsih, A. T. R., & Suwarno, E. (2023). Manajemen Usaha dan Pemasaran Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kelulut Pomuan. *FLEKSIBEL: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(1) : 1-10.
- Lillah, Z., & Puspaningrum, D. (2020). Relasi Sosial dalam Pengelolaan Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember). *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*. 13(1) : 99-111.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. Amerika Serikat : SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016. *Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44. Jakarta.
- Puspaningrum, D., & Kusmiati, A. (2018). Relasi Kuasa, Mekanisme dan Strategi Meraih Kekuasaan dalam Program Social Forestry pada Taman Nasional Meru Betiri. *Agriekonomika*. 7(1): 57-71.
- Satriadi, T., Aryadi, M., & Fauzi, H. (2020). Persepsi dan Sikap Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tebing Siring terhadap Program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Lebah Madu. *Jurnal Hutan Tropis*. 8(2) : 203-211.
- Sidiq, R. S. S., Resdati, R., Ihsan, M., Sulistyani, A., & Sugiyanto, S. (2023). Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kawasan Bandar Bakau Kota Dumai. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*. 4(2) : 661-672.
- Syipa, M., Nurastuti, F., Khoirinka, R. P., Setiawan, A. R., & Hamdan, A. (2023). Manajemen Organisasi Komunitas Sahabat Anak: Studi pada Tata Kelola Organisasi Komunitas Sahabat Anak Tasikmalaya. *JoCE (Journal of Community Education)*. 3(1) : 58-65.

- Yuliana, B. (2022). Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Indikator Pembangunan Desa. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7(2) : 2799-2812.
- Zahran, R. A., & Hermansah, T. (2022). Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wisata Bekelir Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 1(1) : 1-17.